

DAMPAK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KARAKTERISTIK MASYARAKAT DI KABUPATEN KEEROM

Wa Ariadi

waariadi@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Ahadi Rerung

adrrgn15437@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Windy Jatmika

jatmikaaw@gmail.com

Universitas Timika Papua

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the implementation of non-cash transactions with measuring variables are government commitment, human resource readiness, and cooperation on community characteristics. The study used a sample of 75 people from all Work Units or offices in the Keerom District government related to finance. The results indicate that partially the implementation of non-Cash transactions with the variable commitment of the local government (X1), Readiness of Human Resources (X2), and Cooperation (X3) have an impact on the Characteristics of the Community (Y) in Keerom Regency which can be seen from the test value t-count compared to t-table as well as a significant level. Implementation of non-cash transactions jointly or simultaneously has an impact on the characteristics of the community (Y) in Keerom Regency which is done by comparing p_value or probability (F-statistics) with a significant level. From the calculation of the magnitude of the probability (F-statistic) and the significant level is set at $\alpha = 5\% = 0.05$, so the p_value or probability of this result then the comparison (f-count) with the value of 17,822 with a significant level is 0,000. These results explain that simultaneous implementation of non-cash transactions with government commitment variable (X1), human resource readiness variable (X2), cooperation variable (X3) together have an impact on community characteristics (Y), so the hypothesis stating that the variables of government commitment, readiness of human resources, and cooperation have a positive and significant effect on the characteristics of the community declared acceptable and can be verified. The influence and direction of the relationship of the variables determined have a positive correlation coefficient, so that all variables have a direct relationship as the results of this analysis that the correlation coefficient (r) of 59.7% shows a strong relationship between the independent variable and the dependent variable.

Keywords: Government Commitment, Human Resources, Cooperation and Community Characteristics.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah baik itu pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berasaskan perundang-undangan dan asas otonomi dengan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Transaksi non tunai merupakan transaksi yang tidak melakukan pembayaran secara tunai tetapi dengan cara pemindah bukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain.

Penetapan serta penyusunan keputusan untuk kebijakan dalam *administrative governance* yang berkaitan dengan penggunaan instrumen pembayaran non tunai di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran non tunai. Beberapa instrumen pembayaran non tunai yang berkembang dewasa ini, selain warkat atau cek yang umumnya sudah diketahui, di antaranya adalah Kartu Kredit, Kartu Debet, Anjungan Tunai Mandiri, Kartu PraBayar, Kartu Klub serta *e-banking*.

Di era perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai. Cepat, aman, nyaman, mudah dan efisien dalam

bertransaksi merupakan alasan masyarakat Indonesia memiliki respon yang besar terhadap sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non tunai ini telah dikembangkan oleh pihak bank maupun non bank sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan tingkat persaingan bank yang semakin tinggi mendorong sektor perbankan atau non bank untuk semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran non tunai berupa sistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik (*electronic card*).

Sistem pembayaran yang efisien dapat diukur dari kemampuan dalam menciptakan biaya yang minimal untuk mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan transaksi. Pengguna jasa alat pembayaran akan menggunakan jasa alat pembayaran yang memiliki harga yang relative lebih rendah sehingga biaya transaksi yang harus dikeluarkan juga rendah. Melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan kecepatan transaksi, inovasi pembayaran elektronik membuat sistem pembayaran non tunai lebih efektif (SnellmandanVesalla, 1999).

Bank Indonesia dalam mengembangkan dan membangun cetak biru sistem pembayaran Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang tidak lepas dari prinsip-prinsip yang telah dikembangkan oleh *Committe on Payment and Settlement Systems* (CPSS) yang meliputi 10 kriteria, seperti: (1) memiliki landasan yang kuat, (2) mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami risiko keuangan yang mungkin dihadapi, (3) memiliki prosedur yang jelas untuk manajemen risiko, (4) menjamin agar setelmen dapat dilakukan pada hari yang sama minimal pada akhir hari, (5) memiliki *multylateral netting*, (6) aset yang digunakan sebaiknya berada di Bank Sentral, (7) menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan operasional yang tinggi, (8) menyediakan alat yang praktis untuk pemakainya dan efisien, (9) memiliki tujuan dan kriteria yang transparan untuk peserta, dan (10) pengaturan dari sistem harus efektif, akuntabel, dan transparan (CPSS, 2000).

Beberapa kajian lainnya seperti dilakukan oleh Goodhart (2000), Freedman (2000), dan Woodford (2000) memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap implikasi perkembangan alat pembayaran non tunai pada kebijakan moneter. Mereka berpendapat bahwa perkembangan teknologi pembayaran tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter. Lebih lanjut, Lahdenpera (2001) dalam kajiannya menyatakan bahwa dampak perkembangan teknologi pembayaran terhadap pelaksanaan kebijakan moneter adalah tergantung pada tingkat preferensi masyarakat dalam memilih alat pembayaran untuk melakukan transaksi. Pramono, et al (2006) mencatat bahwa kenaikan pembayaran menggunakan kartu yaitu Kartu ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit dan *e-money* dapat menurunkan permintaan uang kartal. Bank Indonesia (2006) menyampaikan bahwa secara umum instrumen pembayaran non tunai dapat dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan fisik alat yang digunakan, yaitu: (1) instrumen-instrumen berbasis warkat/kertas atau *paper based instruments*, (2) instrumen-instrumen berbasis kartu atau *card based instruments*, (3) instrumen-instrumen berbasis elektronik atau *elec tronic based instruments*.

Pemerintah Kabupaten Keerom merupakan salah satu kabupaten yang berpeluang untuk mulai menerapkan sistem transaksi non tunai, di mana kondisi

saat ini belum optimal dalam penerapan sistem transaksi non tunai. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor terutama yang berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang sebahagian besar menganggap bahwa keberadaan mereka tidak membutuhkan model transaksi tersebut, selain itu mereka lebih cenderung dengan transaksi tunai karena dapat mengetahui nilai *value* yang diterima, sehingga untuk mewujudkan implementasi transaksi tersebut sesuai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah pusat yang berdasarkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan *good governance* yang berbasis teknologi.

Sejauh ini yang telah dilakukan pembayaran tunai oleh pemerintah Kabupaten Keerom adalah pembayaran gaji pegawai, anggaran biaya program. Artinya bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Keerom belum sepenuhnya melaksanakan pembayaran non tunai namun upaya untuk pelaksanaan tersebut sudah mulai diimplementasikan. Untuk mewujudkan pembayaran non tunai di Kabupaten Keerom secara maksimal masih terkendala dengan berbagai faktor seperti kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi, sistem informasi yang memadai. Bank Indonesia (2006) menyampaikan bahwa keberhasilan pengembangan sistem pembayaran non tunai tidak bisa dilepaskan dari kesiapan masyarakat baik masyarakat umum (sebagai pengguna), dunia usaha (sebagai penerima sistem pembayaran) maupun perbankan untuk menerima sistem pembayaran yang relatif masih baru tersebut. Oleh karenanya, diperlukan suatu penelitian untuk menggali informasi tentang kesiapan masyarakat serta potensi pengembangan instrumen pembayaran non tunai sesuai dengan karakteristik masyarakat dan karakteristik wilayah di seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi transaksi non Tunai melalui variabel komitmen Pemerintah Daerah, Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kerja sama terhadap Karakteristik Masyarakat di Kabupaten Keerom baik secara parsial maupun secara simultan.

B. LANDASAN TEORI

Istilah "*Governance*" menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahan di mana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta dan masyarakat (Thoha; 2000, 12).

Lembaga Administrasi Negara (2000,6) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sector swasta dan masyarakat (*society*). Pada tataran ini, *good governance* berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni :*Pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, *good governance* mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan

bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, seperti *legitimacy*, *accountability*, *scuring of human right*, *autonomy and devolution of power* dan *assurance of civilian control*; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, *good governance* tergantung pada pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Mishkin (2001), mengungkapkan secara sederhana bahwa sistem pembayaran adalah metode untuk mengatur transaksi dalam perekonomian. Sistem pembayaran adalah sesuatu yang penting karena membentuk spesialisasi yang terjadi dalam produksi dan membantu menciptakan transaksi yang efisien (Humphrey, 2001). Hal ini pada akhirnya punakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dalam pasar uang. Menurut Listfield dan Montes-Negret (1994), sistem pembayaran adalah peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (*financial value*) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban. Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sistem pembayaran telah mengalami evolusi selama beberapa abad, sejalan dengan perubahan hakikat/sifat dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Dalam sejarah, koin metalik merupakan jenis uang pertama yang banyak digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai alat pembayaran. Dalam perkembangannya, peran koin sebagai alat pembayaran dilengkapi dengan kehadiran uang kertas yang dianggap lebih nyaman dan lebih memudahkan proses transaksi karena lebih ringan dengan biaya pembuatan yang lebih murah. Masalah yang timbul dalam sistem pembayaran adalah emas dan perak cukup berat dalam jumlah tertentu sehingga susah untuk didistribusikan dan tidak praktis, maka evolusi ini berubah ke dalam penggunaan uang *fiat* (uang kepercayaan). Uang *fiat* adalah uang kertas yang diumumkan oleh pemerintah sebagai alat transaksi (Miskhin, 2001). Kelebihan dari uang *fiat* ini adalah beratnya yang lebih ringan daripada koin emas atau perak dan membantu pemerintah untuk berhemat dalam pengadaan uang. Selain itu, uang kertas ini menjadi legal dalam sistem pembayaran maka dalam perkembangannya setiap negara memiliki jenis mata uangnya sendiri.

Instrumen Berbasis Warkat/Kertas (*Paper Based Instruments*). Instrumen-instrumen berbasis warkat ini, umumnya sudah lama dipergunakan dalam praktek perbankan. Beberapa instrumen yang masuk dalam kategori ini adalah Cek, Bilyet Giro, Nota Debet dan Nota Kredit (Bank Indonesia, 2006).

- 1) Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- 2) Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
- 3) Nota Debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.

- 4) Nota Kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut.
- 5) Wesel Bank untuk transfer, wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.
- 6) Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagih kepada bank penerima dana transfer melalui kliring lokal.

Instrumen Berbasis Kartu dan Berbasis Elektronik (*Card Based Instruments and Electronic Based Instruments*), Beberapa jenis kartu pembayaran, baik yang bersifat kredit seperti kartu kredit dan *private-label cards* (misalnya: kartu pasar swalayan) maupun yang bersifat debit, seperti *Debit Cards* dan ATM (*Automated Teller Machine*) telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di samping itu, ada juga kartu yang biasa disebut *Smart Card* atau *Chip Card*, sejenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik. Jenis kartu ini contohnya adalah kartu telepon Prabayar (Bank Indonesia, 2006). Kartu Plastik adalah salah satu bentuk populer dari sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *Cryptography* dan jaringan komunikasi.

Pembayaran elektronik yang banyak berkembang dan dikenal saat ini antara lain *Phone Banking*, *Internet Banking*, Kartu Kredit dan Kartu Debit/ATM. Seluruh pembayaran elektronik tersebut, kecuali Kartu Kredit selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Lebih lanjut, beberapa negara dewasa ini mulai memperkenalkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *Electronic Money (e-money)* atau dapat disebut juga *Digital Money*.

APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) adalah alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, Kartu *Automated Teller Machine (ATM)* dan/atau Kartu Debit.

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai didasari oleh instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Penerapan Transaksi Non Tunai merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, inisiasi dengan Ketentuan Pasal 283 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka pemerintah melakukan upaya percepatan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- 1) Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
- 2) Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi: (a) penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan (b) pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.
- 3) Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.
- 4) Gubernur menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
- 5) Pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur.
- 6) Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi dan melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi nontunai pada kabupaten/ kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.

C. METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam menganalisis sifatnya deskriptif analitik dari populasi yang ditetapkan. eksperimen yaitu satu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat yang merupakan penelitian kausal atau sebab akibat. Sugiyono (2012:7). Menurut Kuncoro (2003:8) menyebutkan penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesisnya atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap, atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. sampel yang digunakan adalah 45 orang masyarakat sebagai partner kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pengusaha sebanyak 20 orang dan Aparat Kampung sebanyak 25 orang.

Penelitian ini menggunakan pengukuran Skala Likert, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang akan diuji, setiap jawaban akan diberi skor. Untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian ini, maka peneliti memberikan lima alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai 5

Analisis Regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana *dependent variable* dapat diprediksi melalui *independent variable* secara individual. Karena hipotesis penelitian yang dirumuskan menunjuk pada penelitian korelatif, maka

teknik analisis data menggunakan metode statistik regresi berganda (*multiple regression analysis*). Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan program komputer dengan *software SPSS Ver. 20.00*, sedangkan model yang dipakai dalam analisis adalah :

$$Y = b + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

dimana :

| | |
|--|---|
| Y | = Karakteristik Masyarakat |
| b ₀ | = Nilai Konstan untuk Y, jika X ₁ , X ₂ , dan X ₃ = 0 |
| b ₁ , b ₂ , b ₃ | = Koefisien korelasi dari variabel X ₁ , X ₂ , dan X ₃ dalam satu satuan,. |
| X ₁ | = Komitmen pemerintah |
| X ₂ | = Kesiapan Sumber Daya Manusia |
| X ₃ | = Kerja sama |
| ε | = Standart Error |

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Pengujian dampak secara Parsial

Pengukuran dampak masing-masing variabel Komitmen Pemerintah (X1), Sumber Daya Manusia (X2), dan Kerja Sama (X3) sebagai variabel bebas atau variabel independen, terhadap Karakteristik Masyarakat sebagai variabel dependen (Y), maka dapat dilihat berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis (uji-t) dan akan diperkuat dengan hasil analisis koefisien korelasi dan determinasi dengan melihat besarnya nilai *r-square* ataupun *adjusted r-square*. Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk melihat kontribusi variabel Komitmen Pemerintah (X1), kesiapan Sumber Daya Manusia (X2), dan Kerja Sama (X3) sebagai variabel bebas atau variabel independen, dan variabel dependen adalah Karakteristik Masyarakat (Y) di Kabupaten Keerom.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berdampak positif dan signifikan terhadap karakteristik masyarakat Kabupaten Keerom. Hasil uji statistik tersebut dapat dijelaskan bahwa Pengaruh komitmen pemerintah terhadap karakteristik masyarakat di Kabupaten Keerom di tunjukkan dengan nilai koefisien regresi variabel komitmen pemerintah (X1) dengan nilai uji – t sebesar = -3.885 dengan tingkat signifikan adalah 0,000. Artinya, semakin baik komitmen pemerintah atau jika pemerintah daerah menjalankan komitmennya melalui regulasi untuk pelaksanaan implementasi transaksi non tunai maka, akan semakin berpengaruh terhadap karakteristik masyarakat di Kabupaten Keerom demikian sebaliknya. Sedangkan untuk berdasarkan kesiapan sumber daya manusia dalam pelayanan menunjukkan nilai uji-t = 0,754 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.454. Hasil tersebut mempunyai makna bahwa kesiapan sumber daya manusia dalam pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap karakteristik masyarakat yang ada di kabupaten Keerom. Artinya variabel kesiapan sumber daya manusia dalam pelayanan berpengaruh nyata terhadap karakteristik masyarakat. Dengan koefisien regresi sebesar 0,754 memberikan arti bahwa setiap peningkatan kesiapan sumber daya manusia sebesar 1 satuan atau pengembangan sumber daya manusia/pegawai sebanyak 1 orang, maka akan mendorong perbaikan karakteristik masyarakat sebesar 0,754 satuan.

Sedangkan pengujian hipotesis untuk variabel kerja sama hasilnya menunjukkan koefisien sebesar 3.981 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang bermakna bahwa peningkatan kerja sama dengan semua unsur termasuk stakeholder maka, akan memperbaiki karakteristik masyarakat melalui pemahaman atau pengetahuan untuk implementasi transaksi non tunai sebesar 3,981. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap karakteristik masyarakat dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini.

Tabel 1
Regresi Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. |
|-------|---------------------|-----------------------------|------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | | |
| 1 | (Constant) | 28.546 | 4.436 | 6.435 | .000 |
| | Komitmen Pemerintah | -.208 | .053 | -3.885 | .000 |
| | Kesiapan SDM | .079 | .104 | .754 | .454 |
| | Kerja Sama | .277 | .070 | 3.981 | .000 |

a. Dependent Variable: Karakteristik Masyarakat

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data tersebut, maka dampak implementasi transaksi non tunai terhadap karakteristik masyarakat dapat disusun persamaan regresi berganda dari sebagai berikut:

$$Y = 28.546 - 0,208X_1 + 0,079X_2 + 0,277X_3$$

Berdasarkan uraian persamaan tersebut maka, dapat dijelaskan bahwa karakteristik masyarakat di kabupaten Keerom telah terbentuk tanpa adanya komitmen pemerintah, kesiapan sumber daya manusia dan kerja sama, sedangkan variabel Komitmen Pemerintah (X1) memiliki nilai Beta (*unstandardized coefficients*) sebesar - 0,208 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hasil ini menjelaskan bahwa Komitmen Pemerintah (X1) berpengaruh tidak signifikan dan tidak nyata terhadap karakteristik masyarakat di Kabupaten Keerom meskipun di perbaiki sebagai wujud perbaikan pelayanan namun kondisi ini tidak akan memperbaiki karakteristik masyarakat di Kabupaten Keerom. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan komitmen pemerintah masih belum bisa memperbaiki karakteristik masyarakat di Kabupaten Keerom. Sedangkan untuk implementasi transaksi non tunai melalui Kesiapan Sumber Daya Manusia (X2) memiliki nilai sebesar 0,079 atau 7,9% yang menunjukkan bahwa jika kesiapan sumberdaya manusia mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap karakteristik masyarakat, dimana setiap peningkatan kesiapan sumberdaya manusia maka akan memperbaiki karakteristik masyarakat. Demikian dengan variabel kerja sama (X3) yang mempunyai koefisien sebesar 0,277 yang bermakna bahwa kerja sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap karakteristik masyarakat (Y) dan setiap ada peningkatan kerja sama oleh

pemerintah daerah termasuk dengan masyarakat maka akan meningkatkan karakteristik masyarakat.

Hubungan dan dampak yang timbul secara bersama-sama dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), dapat dilihat melalui hasil uji koefisien regresi dan determinasi berdasarkan besarnya nilai *r-square* ataupun *adjusted r-square*. Pengujian koefisien regresi dan determinasi variabel Komitmen Pemerintah (X1), Sumber Daya Manusia (X2), dan Kerja sama (X3) sebagai variabel bebas atau variabel independen, dan variabel dependen adalah Karakteristik Masyarakat (Y) di Kabupaten Keerom, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Regresi dan Determinasi (Model Summary^b)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .597 ^a | .357 | .325 | 1.26859 | 1.821 |

a. Predictors: (Constant), Kerja Sama, SDM, Komitmen Pemerintah

b. Dependent Variable: Karakteristik Masyarakat

Sebagaimana hasil analisis pada tabel diatas, menunjukkan bahwa adjusted r-square menunjukkan angka sebesar $(R^2)=0,325$. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu komitmen pemerintah (X1), sumber daya manusia (X2), dan kerja sama (X3) memberikan kontribusi sebesar 32,5 % terhadap karakteristik masyarakat (Y). Sisanya sebesar 67,5 %, Karakteristik masyarakat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti. Sedangkan hubungan yang timbul akibat imlementasi transaksi non Tunai bedasarkan variabel komitmen pemerintah (X1), sumber daya manusia (X2), dan Kerja Sama (X3) menunjukkan nilai hubungan yang kuat dimana besarnya nilai $R= 59,7$ sebagaimana yang disampaikan oleh (Sarwono:2006) memberikan kriteria sebagai berikut : 0 : Tidak ada korelasi antara dua variable, $> 0 - 0,25$: Korelasi sangat lemah, $> ,25 - 0,5$: Korelasi cukup, $> 0,5 - 0,75$: Korelasi kuat, $> 0,75 - 0,99$: Korelasi sangat kuat dan 1 : Korelasi sempurna.

b. Pengujian Dampak Secara Simultan

Untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen (X) yang terdiri atas komitmen Pemerintah (X1), dan sumber daya manusia (X2), kerja sama (X3) terhadap variabel dependen karakteristik masyarakat (Y), dapat dilihat berdasarkan tabel hasil data dengan bantuan SPSS Versi 20.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Pengaruh Simultan (ANOVA)

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 100.516 | 3 | 33.505 | 17.822 | .000 ^a |
| Residual | 78.962 | 42 | 1.880 | | |
| Total | 179.478 | 45 | | | |

a. Predictors: (Constant), Kerja Sama, SDM, Komitmen Pemerintah

b. Dependent Variable: Karakteristik Masyarakat

Berdasarkan diatas, menunjukkan bahwa nilai uji statistik F sebesar 17,822 yang lebih besar dari pada nilai F tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hasil ini menjelaskan bahwa secara simultan, implementasi transaksi non tunai dengan variabel komitmen pemerintah (X1), variabel kesiapan sumber daya manusia (X2), variabel kerja sama (X3) secara bersama-sama atau simultan mempunyai dampak terhadap karakteristik masyarakat (Y), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa variabel komitmen pemerintah, variabel kesiapan sumber daya manusia, dan kerja sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap karakteristik masyarakat dinyatakan diterima dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan uji koefisien determinasi yang menggambarkan dampak implementasi transaksi non tunai yang dapat dilihat dari nilai adjusted r-square sebesar 0,325 memberikan arti bahwa ketiga variabel memberikan kontribusi sebesar 32,5% terhadap karakteristik masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 67,5 %, karakteristik masyarakat dalam menyikapi implementasi transaksi non tunai tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Implikasi dari temuan ini menjelaskan bahwa dampak Implementasi transaksi Non Tunai yang akan jalankan pemerintah Kabupaten Keerom secara simultan berdampak pada karakteristik masyarakat. Artinya, variabel semua variabel bebas tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap karakteristik masyarakat di Kabupaten Keerom.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi transaksi non tunai dengan komitmen pemerintah, kesiapan sumber daya manusia, dan kerja sama berdampak terhadap karakteristik masyarakat mempunyai hubungan linear dan arah hubungan dari variabel yang ditetapkan mempunyai korelasi positif, yang ditunjukkan dengan nilai (r) sebesar 59,7 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel bebas dan variabel terikat.
2. Pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian hipotesisnya diterima yang

ditunjukkan dengan besarnya nilai uji-t dan tingkat signifikan dari masing-masing variabel.

3. Uji signifikansi secara bersama-sama, dilakukan dengan cara membandingkan p_value atau probabilitas (F-statistik) dengan *significant level*. Dari hasil perhitungan besarnya probabilitas (F-statistik) dan *significant level* ditetapkan sebesar $\alpha = 5\% = 0,05$, sehingga p_value atau probabilitas hasil ini maka perbandingan (f-hitung) dengan nilainya sebesar 17.822 dengan tingkat signifikan adalah 0,000 dengan demikian maka, hipotesis (H4) diterima.

b. Saran-Saran

Memperhatikan kesimpulan mengenai pengaruh ketiga variabel bebas di atas terhadap kinerja yang ditetapkan dalam penelitian ini maka disarankan:

1. Implementasi transaksi Non Tunai melalui dapat terus dilaksanakan melalui komitmen pemerintah pelaksana pelayanan publik sebab komitmen pemerintah adalah kekuatan yang ditengarai karena masih banyak perlu disiapkan untuk menghadapi pelaksanaan transaksi non tunai.
2. Kesiapan Sumber daya manusia merupakan faktor penentu terlaksananya pelayanan publik dan implementasi transaksi non tunai sehingga perlu secara terus menerus dilakukan pembinaan dan peningkatan pengetahuan.
3. Kerja sama antara pemerintah dan semua stakeholder secara terus menerus masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan implementasi transaksi non tunai lebih baik dan secara luas.
4. Penyebaran informasi baik melalui sosialisasi, pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidental, melalui sanduk, jaringan informasi yang dibarengi dengan pembinaan pengetahuan bagi masyarakat banyak perlu terus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, (2006). *Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa terhadap Sistem Pembayaran Non Tunai*. Jakarta: Bank Indonesia.
- (1999). *Peraturan Bank Indonesia Nomor No.23/1999 Tentang Pengertian Sistem Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Freedman C. (2000) "Monetary Policy Implementation: Past, Present, and Future-Will Electronic Money Lead to the Eventual Demise of Central Banking?" *International Finance* 2:3.
- Goodhart C.A.E, (2000). "Can Central Bank Survive the IT Revolution?" , *International Finance* No 3:2.
- Humphrey, D. B. (2001). *Payment Systems: Principles, Practice, and Improvements*. The World Bank, Washington, D. C.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Lahdenpera, Harri, (2001). "Payment and Financial Innovation, Reserve Demand and Implementation of Monetary Policy", *Bank of Finland Discussion Papers* 26.
- Lembaga Administrasi Negara RI, (2000), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah,

Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah, LAN RI.

- Mishkin, F. S. (2001). *The Economic of Money Banking, and Financial Markets*. Sixth Edition. Addison Wesley Longman: Columbia University, Columbia
- Montes-Negret, Listfield, R. dan F.(1994). “Modernizing Payment System in Emerging Economies”. *World Bank Policy Research Working Paper*, 1336.
- Pramono, Bambang, Yanuarti, Tri, Purusitawati, Emmy Tyas, Yosefin. (2006). “*Working Paper: Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*”, Jakarta: Bank Indonesia.
- Thoha, Miftah (2000), *Perilaku organisasi, konsep dasar dan aplikasinya* PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ *Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai*. 17 April 2017. Jakarta.
- Sugiyono(2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, CV. Alfabeta, Bandung
- Snellman, J. dan J. Vessala. (1999). “Forecasting the Electronification of Payments with Learning Curves”. *Bank of Finland Discussion Paper*.8/99.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Woodford (2000) Woodford, Michael, (2000). “Monetary Policy in a World Without Money”. *NBER WorkingPaper*, No.7853.